PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA. Miliono No. 09 Telp/Fax (0532) 3221854
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2021

www.pt-palangkaraya.go.id
pengadilan_tinggi_palangkaraya
ptpalangka@gmail.com
pengadilantinggipalangkaraya

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		*i*
DAFTAR TABEL		*ii*
DAFTAR GAMBAR		*iv*
DAFTAR GRAFIK		*v*
KATA PENGANTAR		*vi*
IKHTISAR EKSEKUTIF		*vii*
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
	a. Kedudukan	2
	b. Tugas Pokok	4
	c. Fungsi	4
	d. Struktur Organisasi	5
	3. Aspek Strategis Organisasi	7
	4. Sistematika LKjIP Tahun 2021	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	1. Reviu Rencana Strategis 2020-2024	11
	2. Indikator Kinerja Utama	13
	3. Rencana Kinerja Tahun 2021	18
	4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	21
	1. Capaian Kinerja Organisasi	21
	2. Evaluasi dan Analisa Capaian	22
	3. Realisasi Anggaran	40
BAB IV	PENUTUP	49
	1. Kesimpulan	49
	2. Saran	50
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya 3

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 14

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2020 PT Palangkaraya 18

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 PT Palangkaraya 19

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 21

Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 Indikator 1, 2 dan 3 23

Tabel 3.3 Realisasi Penyelesaian Perkara tepat waktu tahun 2019-2021 24

Tabel 3.4 Capaian Sasaran 1 Indikator 4 26

Tabel 3.5 Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi 26

Tabel 3.6 Capaian Sasaran 1 Indikator 5 27

Tabel 3.7 Realisasi Index Kepuasan Responden 28

Tabel 3.8 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 29

Tabel 3.9 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 30

Tabel 3.10 Capaian Sasaran 2 Indikator 3 31

Tabel 3.11 Nilai Akreditasi Pengadilan Negeri 33

Tabel 3.12 Kelengkapan Sarana dan Prasarana PTSP 36

Tabel 3.13 Penilaian Kinerja Tahun 2021 Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Palangkaraya 37

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Tahun 2021 Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Palangkaraya 38

Tabel 3.15 Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Capaian Tahun Anggara ..n 2019 – 2021 40

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Dipa 01 TA. 2021 per jenis belanja 41

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Dipa 01 pada TA 2021 per output..... 42

Tabel 3.18 Perbandingan PAGU dan Realisasi Belanja DIPA 01 Tahun 2019-2021…. 43

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Dipa 03 pada TA 2021 per *output*..... 44

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2019-2021 45

Tabel 3.21 PNBP Umum Tahun 2019-2021..... 46

Tabel 3.22 PNBP Fungsional Tahun 2019-2021..... 47

Tabel 3.23 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021 48

Tabel 3.24 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2021 48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Palangkaraya 3

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya 6

Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis 11

Gambar 2.2 Visi Pengadilan Tinggi Palangkaraya 12

Gambar 2.3 Misi Pengadilan Tinggi Palangkaraya 11

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 Capaian Sasaran 1 Indikator 1, 2 dan 3 Tahun 2019-2021 23

Grafik 3.3 Realisasi Sasaran 1 Indikator 1,2 dan 3 Tahun 2019-2021 24

Grafik 3.3 Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2019-2021 26

Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi Tahun Anggaran 2019-2021 40

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja 41

Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Dipa 01 pada TA 2021 per output 42

Grafik 3.7 Realisasi Anggaran DIPA 01 TA 2021 per Jenis Belanja 43

Grafik 3.8 Realisasi Anggaran Dipa 03 pada TA 2021 per output 44

Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2019-2021 45

Grafik 3.10 PNBP Umum Tahun 2019-2021 46

Grafik 3.11 PNBP Fungsional Tahun 2019-2021 47

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangkaraya merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam upaya mencapai visi "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang Agung". Proses penyusunan laporan kinerja ini berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangkaraya atas penggunaan anggaran tahun 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Capaian Kinerja.

Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah berhasil dicapai dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palangkaraya baik bidang teknis maupun non teknis.

Semoga laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan Semoga dengan adanya laporan ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangkaraya juga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya, 18 Februari 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. Zainuddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di dalam Reviu Perencanaan Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021 mengacu kepada Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Peradilan.
4. Terwujudnya Dukungan Pelaksaan Tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan 4 (empat) Sasaran Strategis tersebut secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021 dapat dinyatakan “berhasil”, dimana capaian rata-ratanya sebesar 98,63%. Dari 4 (empat) Sasaran Stategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 hanya “Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel” yang memiliki capaian rata-rata ≤100%.

Faktor yang menjadi pendukung keberhasilan antara lain adanya keterlibatan serta komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk berkinerja dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan pelayanan excelent kepada masyarakat. Selain itu sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dalam pencapaian target kinerja, maka telah diterapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang dirancang sedemikian rupa dan dilaksanakan secara berkala.

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	**100%**
2	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	**100%**
3	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	**100%**
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	55%	40%	**72,7%**
5	Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi	98%	97,9%	**99,9%**
RATA RATA CAPAIAN SEBESAR 94,5%				

SASARAN STRATEGIS 2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	**100%**
2	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	**100%**
3	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	**100%**
RATA RATA CAPAIAN SEBESAR 100%				

SASARAN STRATEGIS 3 TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN PUBLIK ATAS LAYANAN PERADILAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%	100%	**100%**
RATA RATA CAPAIAN SEBESAR 100%				

SASARAN STRATEGIS 4 TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya	96	96	**100%**
2	Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya	11	11	**100%**
3	Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%	100%	**100%**
RATA RATA CAPAIAN SEBESAR 100%				

BAB I
PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2020-2024. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Tahun 2021 merupakan tahun kedua penjabaran Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugasnya sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan fungsinya, yaitu mengadili,

pembinaan, pengawasan, administratif dan fungsi lainnya, melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan. Berdasarkan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Palangkaraya akan menjelaskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja diwaktu yang akan datang.

2. *Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi*

a. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Palangkaraya terbentuk tanggal 29 Juli 1980 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkedudukan di Kota Palangka Raya, meliputi wilayah hukum seluruh Pengadilan Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya terletak di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan RTA Milono Nomor 09 Palangka Raya, Kode Pos 73111, Telp. (0536) 3221853, Faks. (0536) 3221854.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya terdiri atas 11 Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah 1 kota dan 10 kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum sebagai berikuti:

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Nomor	Nama	Wilayah Hukum
1	*2*	*3*
1	Pengadilan Negeri Palangkaraya	Kota Palangka Raya
2	Pengadilan Negeri Sampit	Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Kabupaten Kuala Kapuas
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh	Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya
6	Pengadilan Negeri Buntok	Kabupaten Barito Selatan
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Kabupaten Barito Timur
8	Pengadilan Negeri Kasongan	Kabupaten Katingan
9	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Kabupaten Gunung Mas
10	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	Kabupaten Lamandau
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 1.1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

b. Tugas *Pokok*

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya mempunyai tugas secara tidak langsung atau vertikal membantu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, serta pembinaan administrasi pengadilan tingkat pertama di wilayahnya, serta mengoptimalkan dan memaksimalkan pranata dan tata laksana perkara di tingkat banding.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya."
2) **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5) **Fungsi Lainnya** :

   a. Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (*vide*: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)

   b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek Kuasa Insidentill yang akan beracara pada Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

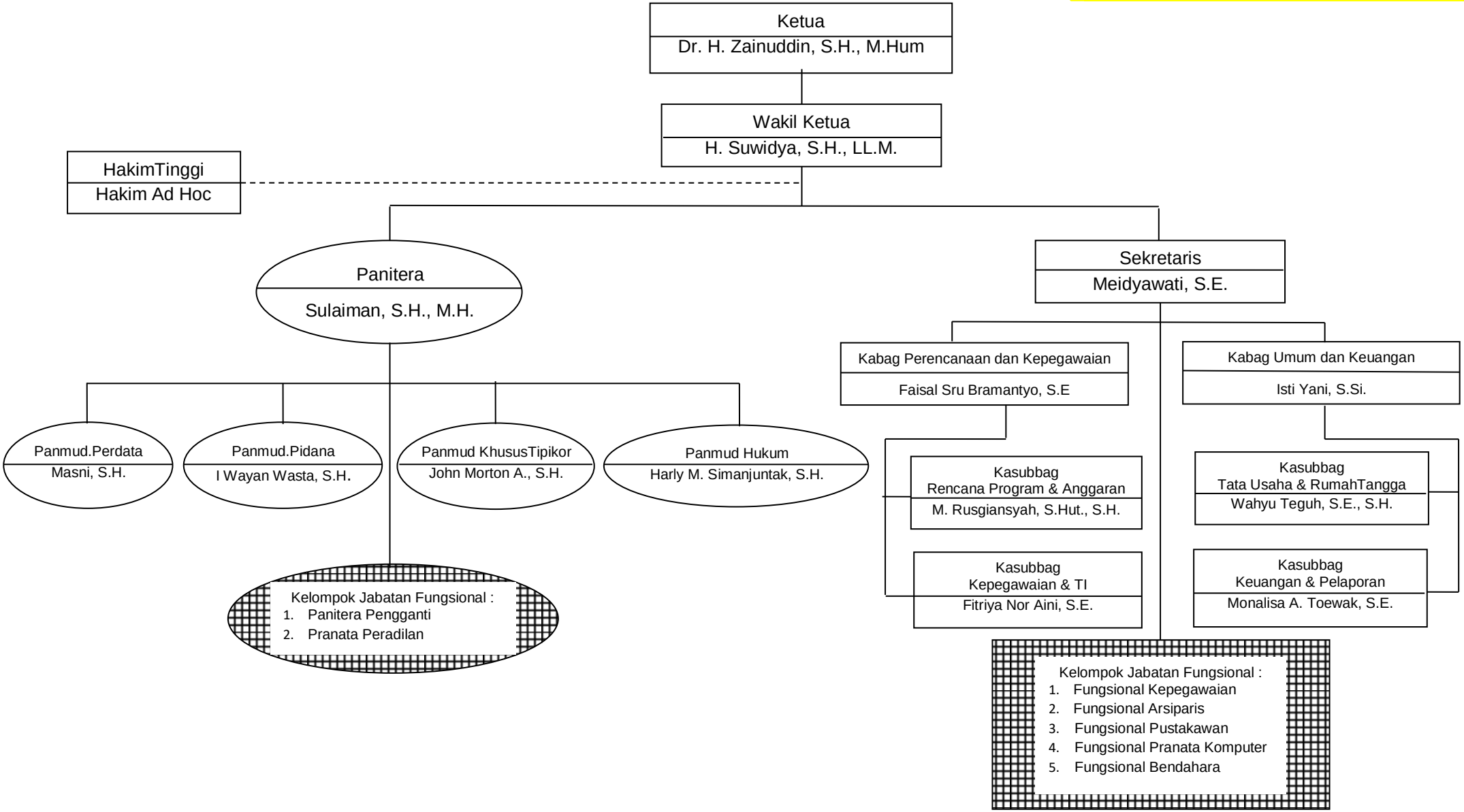

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

3. *Aspek Strategis* Organisasi

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bertumpu pada isu-isu strategis, analisis faktor-faktor strategis internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

Potensi permasalahan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dipetakan melalui analisis SWOT, sebagai metode perencanaan strategis untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor *strengths, weakness, opportunities* dan *threats* dalam sebuah organisasi dan bisnis**.**

a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisis kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

1) *Strengths* (Kekuatan)

- Potensi sumberdaya manusia secara kualitas cukup memadai.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- Potensi lingkungan internal yang memadai.
- Stuktur Organisasi dengan nomenklatur baru.
- Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi).

***2) Weakness (*Kelemahan)**

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI), serta

masih perlu pembenahan sarana dan prasarana TI di sektor internal Pengadilan.

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana pelayanan public.
- Sumber daya manusia secara kuantitas belum memenuhi beban kerja yang ada.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya.
- Masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Peradilan melalui diklat maupun bimtek yang dilakukan secara berkesinambungan.

b. **Analisis Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan luar yang dapat berpengaruh pada kinerja Instansi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, antara lain :

1) *Opportunities* (Peluang)

- Kepercayaan publik meningkat yang dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.
- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat, maupun *stakeholders* terkait lainnya.
- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

2) *Threats* (Ancaman)

- Masih ada upaya dari pencari keadilan untuk melakukan intervensi terhadap Hakim pemeriksa perkara.
- Perkembangan TI yang sangat pesat namun tidak didukung dengan kapasitas maupun kualitas SDM yang memadai.

4. Sistematika *LKjIP Tahun* 2021

LKjIP ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas dalam rangka terwujudnya *good governance*. LKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY (*IKHTISAR EKSEKUTIF*)

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategis Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja di tahun 2021, uraian analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, dan uraian dari analisis

akuntabilitas anggaran tentang pencapaian sasaran-sasaran keuangan yang telah direalisasikan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. *Reviu Rencana Strategis 2020-2024*

Reviu Rencana Strategis 2020-2024 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Hasil pelaksanaan Reviu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi *progres report* tahunan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

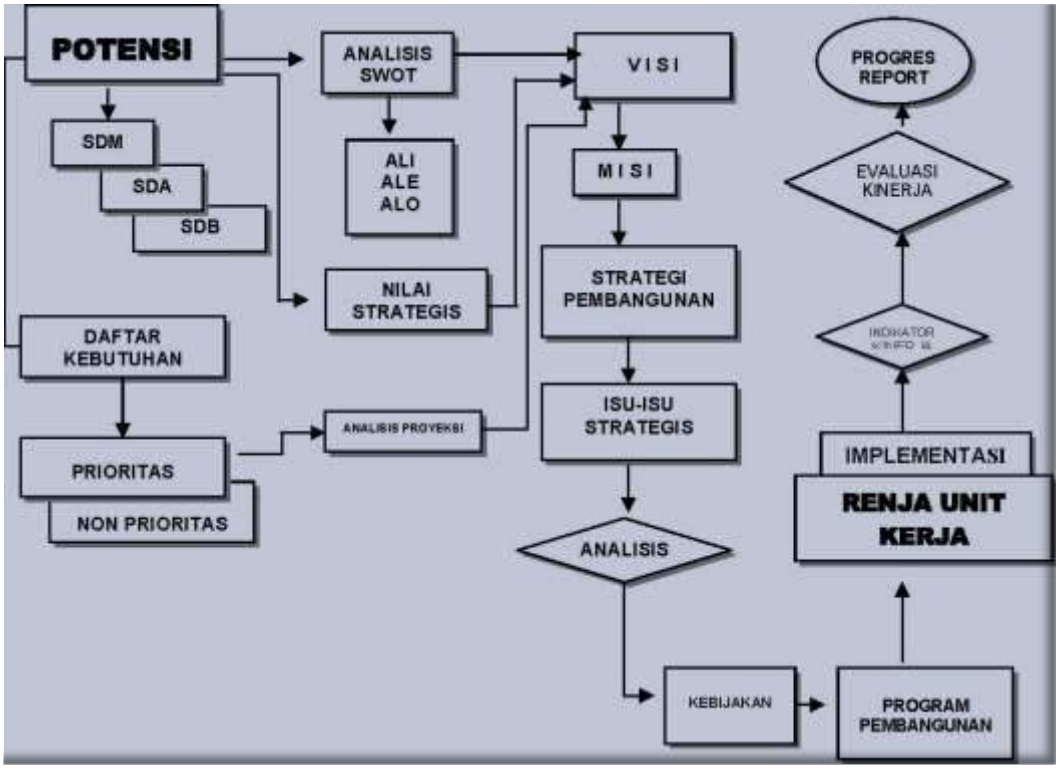

Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis

Keterangan :

SDA : Sumberdaya Alam
SDM : Sumberdaya Manusia
SDB : Sumberdaya Buatan
ALI : Analisis Lingkungan Internal
ALE : Analisis Lingkungan Eksternal
ALO : Analisis Lingkungan Organisasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Pengadilan Tinggi Palangkaraya merumuskan visinya, sebagai berikut:

Gambar 2.2 Visi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Perumusan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

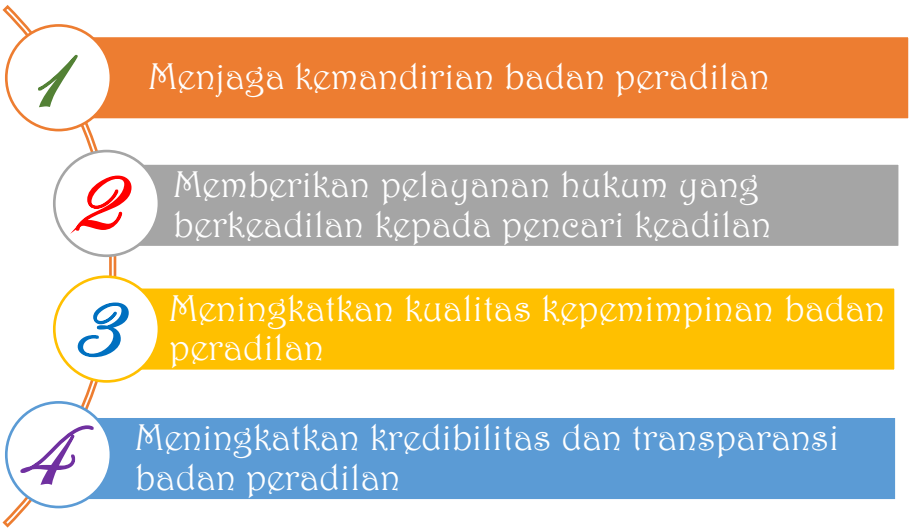

Gambar 2. 3 Misi Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan sasaran dan tujuan strategis 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan
4. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya

2. Indikator Kerja Utama

Berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menetapkan Reviu Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Penyelesaian perkara tepat waktu sesuai dengan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Penyelesaian perkara tepat waktu sesuai dengan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP		
		c. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}$ x 100% **Catatan :** • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Penyelesaian perkara tepat waktu sesuai dengan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ x 100% **Catatan :** • Upaya hukum Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan :** PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		layanan Pengadilan Tinggi	Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}}$ x 100% **Catatan:** • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}}$ x 100% **Catatan:** • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di } upload \text{ dalam } website}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}}$ x 100% **Catatan:** • *One day publish* adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *One Day Publish*	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 memuat target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini merupakan komitmen yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya maka disusun Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021 PT Palangkaraya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke II (2021)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		3. Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	55 %
		5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.	98 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %
3.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	1. Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke II (2021)
4.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya	1. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	96
		2. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	11
		3. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100 %

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama 2020-2024, serta mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PT Palangkaraya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke II (2021)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke II (2021)
		3. Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	55 %
		5. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.	98 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %
3.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	1. Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100 %
4.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya	1. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	96
		2. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	11
		3. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100 %

	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp	23.840.394.000,00
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp	278.011.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

1. *Capaian Kinerja Organisasi*

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021 telah tercapai.

Dari 12 indikator untuk 4 sasaran, sebanyak 10 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian 100 % terhadap target yang ditetapkan.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL				
No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%
2	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%
3	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	55%	40%	72,7%
5	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	98%	97,9%	99,9%
SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%
SASARAN STRATEGIS 3 : TERWUJUDNYA KEPERCAYAAN PUBLIK ATAS LAYANAN PERADILAN				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%	100%	100%
SASARAN STRATEGIS 4 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya	96	96	100%
2	Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya	11	11	100%
3	Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%	100%	100%

2. *Evaluasi Dan Analisa Capaian*

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 5 indikator yang diukur pada sasaran ini, 3 indikator memperoleh capaian 100% dan terdapat 2 indikator yang memperoleh capaian <100%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu : 100%
2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu : 100%
3. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu : 100%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : 72,7%
5. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi : 99,9%

✓ Sasaran 1 Indikator 1, 2 dan 3

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian untuk perkara perdata 100%, perkara pidana 100%, dan perkara Pidana Khusus 100%. Secara umum capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk ketiga perkara selama tiga tahun terakhir selalu tercapai 100%.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 Indikator 1, 2 dan 3

Tahun	Perkara	Target dan Realisasi		Capaian
Th.2021	1.Perdata	Target	100%	100%
		Realisasi	100%	
	2.Pidana	Target	100%	100%
		Realisasi	100%	
	3.Pidana Khusus	Target	100%	
		Realisasi	100%	100%
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 1, 2 dan 3 Th. 2021				100%
Th.2020	1.Perdata	Target	100%	100%
		Realisasi	100%	
	2.Pidana	Target	100%	100%
		Realisasi	100%	
	3.Pidana Khusus	Target	100%	100%
		Realisasi	100%	
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 1,2 dan 3 Th. 2020				100%
Th.2019	1.Perdata	Target	90%	111,1%
		Realisasi	100%	
	2.Pidana	Target	90%	111,1%
		Realisasi	100%	
	3.Pidana Khusus	Target	90%	111,1%
		Realisasi	100%	
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 1,2 dan 3 Th. 2019				111,1%

Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah. Angka ini menunjukkan selama 3 (tiga) tahun selama 2019 – 2021 capaian penyelesaian perkara pada selalu tercapai 100%.

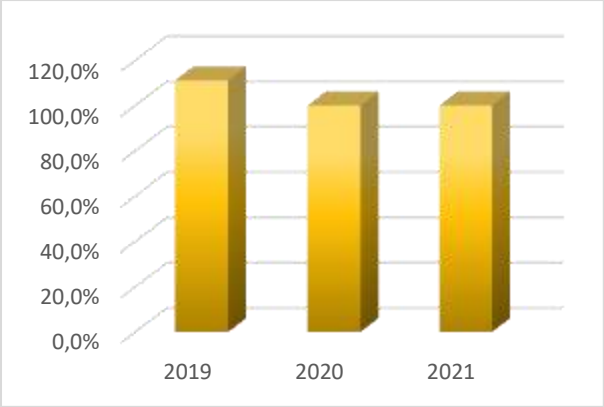

Grafik 3.1 Capaian Sasaran 1 Indikator 1, 2 dan 3 Tahun 2019-2021

Capaian pada tahun 2021 mencapai 100% sama dengan tahun 2020 Hal tersebut dikarenakan dalam upaya mempercepat penyelesaian perkara, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengeluarkan SK Nomor 89/KPT/HK/SK/4/2021 tentang Pemberlakuan *Standard Operational Procedure* (SOP) Percepatan Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Grafik dibawah menunjukkan selama tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Grafik 3.2 Realisasi Sasaran 1 Indikator 1,2 dan 3 Tahun 2019-2021

Pada tahun 2021 penyelesaian perkara pidana 100%, perdata 100% dan Pidana Khusus 100%. Penyelesaian perkara di tahun 2021 memiliki realisasi yang sama dengan tahun 2020 dan tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya mencapai target sesuai data pada tabel dibawah.

Tabel 3.3 Realisasi Penyelesaian Perkara tepat waktu tahun 2019-2021

Th. 2021	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Realisasi
Perdata	117	117	100%
Pidana	172	172	100%
Pidana Khusus	6	6	100%
Jumlah	295	295	100%
Th. 2020	**Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu**	**Jumlah Perkara yang diselesaikan**	**Realisasi**
Perdata	77	77	100%
Pidana	111	111	100%
Pidana Khusus	9	9	100%
Jumlah	197	197	100%
Th. 2029	**Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu**	**Jumlah Perkara yang diselesaikan**	**Realisasi**
Perdata	75	75	100%
Pidana	109	109	100%
Pidana Khusus	7	7	100%
Jumlah	191	191	100%

Untuk meningkatkan indikator persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan antara lain:

a. Batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu *one day publish* (satu hari setelah putus).
c. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus.
d. Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.

✓ Sasaran 1 Indikator 4
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Pada tahun 2021, capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 72,7%. Sesuai data pada tabel di bawah, capaian indikator perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2021 secara umum cukup baik karena realisasi kurang dari target yang ditetapkan yaitu 40% sementara target yang ditetapkan sebesar 55%. Rata-rata capaian pada indikator ini cenderung menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 134,5% (tahun 2020), sesuai pada grafik di bawah. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 adanya peningkatan target dari tahun 2020 yaitu 40% menjadi 55% pada tahun 2021 sehingga terdapat penurunan realisasi dan capaian dibandingkan tahun 2020.

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran 1 Indikator 4

Tahun	Indikator	Target dan Realisasi		Capaian
Tahun 2021	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target Realisasi	55% 40%	72,7%
Tahun	Indikator	Target dan Realisasi		Capaian
Tahun 2020	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target Realisasi	40% 53.8%	134.5%
Tahun	Indikator	Target dan Realisasi		Capaian
Tahun 2019	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target Realisasi	85% 94,1%	110,7%

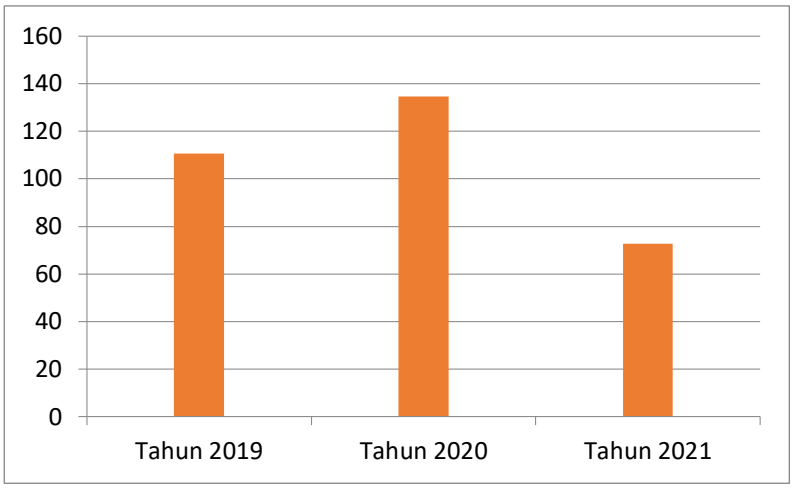

Grafik 3.3 Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2019-2021

Jumlah putusan tingkat banding pada tahun 2021 lebih banyak dibanding tahun 2020 dan tahun 2019 namun persentase capaian perkara yang tidak mengajukan Kasasi pada tahun 2021 lebih rendah dari tahun sebelumnya, sehingga disimpulkan secara umum realisasi indikator ini menurun dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2019.

Tahun 2021, pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat dilihat pada tabel di bawah. Perkara yang tidak mengajukan kasasi sebesar 40%. (dengan kata lain pencari keadilan yang mengajukan kasasi sebanyak 60%). Dibandingkan tahun sebelumnya persentase pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami penurunan.

Tabel 3.5 Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi

TAHUN	PUTUS TK. BANDING	MENGAJUKAN KASASI	TIDAK MENGAJUKAN KASASI	REALISASI YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	REALISASI YANG MENGAJUKAN KASASI
Th. 2021	295	177	118	40%	60%
Th. 2020	197	91	106	53,8%	46,2%
Th. 2019	188	11	177	94,1%	5,9

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, masyarakat pencari keadilan yang melakukan upaya hukum kasasi semakin meningkat dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2019.

Faktor yang menyebabkan masyarakat para pencari keadilan dan pengguna pengadilan tidak melakukan upaya hukum kasasi, disebabkan karena masyarakat semakin puas atas putusan banding pengadilan. Di samping pelayanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya semakin baik dan transparan juga didukung oleh keterbukaan informasi serta cepatnya pelayanan di pengadilan, terutama dalam penyelesaian perkara pada tingkat banding dapat diselesaikan rata-rata dengan waktu 25 hari.

✓ Sasaran 1 Indikator 5
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi diukur mengacu pada Permenpan No.Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi pada tahun 2021 memperoleh capaian sebesar 99,9%, capaian ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 107,7%. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 adanya peningkatan target dari tahun 2020 yaitu 90% menjadi 98% pada tahun 2021 namun untuk realisasinya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran 1 Indikator 5

Tahun	Target dan Realisasi			Capaian
Th. 2021	Target Realisasi		98% 97,92%	99,9%
Th. 2020	Target Realisasi		90% 97%	107,7%
Th. 2019	Target Realisasi		90% 92%	102,2%

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2021 terdiri dari 9 komponen, sebagai berikut : 1. Persyaratan ; 2. Prosedur ; 3. Waktu pelayanan; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Sarana dan Prasarana; 9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Pada tahun 2021, hasil survey kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan dari 9 ruang lingkup yang disurvey, realisasi penilaian tertinggi pada ruang lingkup **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan**, dengan nilai sebesar 3,964 sedangkan nilai terendah pada ruang lingkup **sarana dan prasarana**, dengan nilai 3,679.

Tabel 3. 7 Realisasi Index Kepuasan Responden

Tahun	No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Realisasi	Target	Capaian
2021	1.	Persyaratan	3,964	Sangat Baik	97,9%	98%	99,9%
	2.	Prosedur	3,964	Sangat Baik			
	3.	Waktu Pelayanan	3,964	Sangat Baik			
	4.	Biaya/Tarif	3,964	Sangat Baik			
	5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,964	Sangat Baik			
	6.	Kompetensi Pelaksana	3,893	Sangat Baik			
	7.	Perilaku Pelaksana	3,929	Sangat Baik			
	8.	Sarana dan Prasarana	3,679	Sangat Baik			
	9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,929	Sangat Baik			
Tahun	**No.**	**Ruang Lingkup**	**Rata-rata Skor**	**Kategori**	**Realisasi**	**Target**	**Capaian**
2020	1.	Persyaratan	3.902	Sangat Baik	97%	90%	107,7%
	2.	Prosedur	3.880	Sangat Baik			
	3.	Waktu Pelayanan	3.947	Sangat Baik			
	4.	Biaya/Tarif	3.887	Sangat Baik			
	5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.820	Sangat Baik			
	6.	Kompetensi Pelaksana	3.955	Sangat Baik			
	7.	Perilaku Pelaksana	3.917	Sangat Baik			
	8.	Sarana dan Prasarana	3.812	Sangat Baik			
	9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.835	Sangat Baik			
Tahun	**No.**	**Ruang Lingkup**	**Rata-rata Skor**	**Kategori**	**Realisasi**	**Target**	**Capaian**
2019	1.	Persyaratan	3.192	Baik	92%	90%	102,2%
	2.	Prosedur	3.291	Sangat Baik			
	3.	Waktu Pelayanan	3.059	Baik			
	4.	Biaya/Tarif	3.300	Sangat Baik			
	5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.281	Sangat Baik			
	6.	Kompetensi Pelaksana	3.458	Sangat Baik			
	7.	Perilaku Pelaksana	3.453	Sangat Baik			
	8.	Sarana dan Prasarana	3.187	Baik			
	9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.300	Sangat Baik			

Sasaran 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Indikator-indikator pada sasaran ini berhasil memperoleh capaian ≥ 100% ,indikator tersebut antara lain :

1. Persentase Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu: 100%.
2. Persentase Salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu: 100%.
3. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus: 100%.

✓ Sasaran 2 Indikator 1 dan 2
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja "Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu" adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju dengan jumlah putusan. Tahun 2021 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Salinan Putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Capaian indikator tahun 2021 salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai 100% dan pidana 100%. Pada tahun 2021, jumlah putusan perkara perdata 117 sedangkan pidana (Pidana Umum, Tipikor dan Anak) sebanyak 178 dan seluruh salinan putusan tersebut dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Tabel 3. 8 Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

TAHUN	Jumlah putusan perdata	Jumlah putusan perdata yang dikirim	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2021	117	117	100%	100%	100%
Th. 2020	77	77	100%	90%	111%
Th. 2019	75	75	100%	100%	100%

Tabel 3.9 Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

TAHUN	Jumlah putusan pidana	Jumlah putusan pidana yang dikirim	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2021	178	178	100%	100%	100%
Th. 2020	120	120	100%	100%	100%
Th. 2019	116	116	100%	100%	100%

Pada umumnya Pengadilan Tinggi Palangkaraya langsung mengirim petikan putusan pidana melalui email ke pengadilan pengaju setelah perkara diputus, dan salinan putusan pidana dan perdata dikirim ke pengadilan pengaju paling lama 2 (dua) hari, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam pengiriman putusan perkara.

Kondisi pengiriman salinan putusan perkara Pidana ke Pengadilan pengaju tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui pihak pengirim (Pos Indonesia).

Sedangkan untuk indikator pengiriman salinan putusan perkara Perdata ke Pengadilan pengaju secara tepat waktu, realisasinya juga memiliki capaian sebesar 100%. Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Palangkaraya menetapkan target yang lebih rendah yaitu sebesar 90%. Hal tersebut dikarenakan atas dasar pertimbangan bahwa biaya perkara Perdata di tingkat banding yang sebesar Rp150.000,- dirasa kurang memadai dan berpotensi menjadi kendala dalam hal biaya pengiriman salinan putusan Perdata kepada Pengadilan Pengaju.

Namun dalam perjalanannya selama tahun 2020 tidak terdapat kendala terkait pengiriman salinan putusan perkara Perdata ke Pengadilan pengaju. Seluruh salinan putusan dikirim tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga merupakan dampak positif dari kebijakan Mahkamah Agung yang sudah menerapkan sistem e-Court, sehingga untuk tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya menetapkan target sebesar 100% dan target tersebut dapat dicapai.

✓ Sasaran 2 Indikator 3

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Indikator kinerja "Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus" adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang diunggah dalam *website* dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus.

Tabel 3.10 Capaian Sasaran 2 Indikator 3

Indikator	Tahun		Target dan Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Th. 2021	Target Realisasi		100% 100%	100%
	Th. 2020	Target Realisasi		100% 100%	100%
	Th. 2019	Target Realisasi		100% 100%	100%

Pada tahun 2021 capaian indikator ini mencapai target 100%. Dari jumlah perkara yang diputus 295 perkara, terdapat 6 Perkara yang menarik perhatian masyarakat yaitu perkara pidana khusus tindak pidana korupsi dan perkara tersebut putusannya telah diupload dalam website dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Capaian ini diperoleh karena Pengadilan Tinggi Palangka Raya selalu menerapkan *one day publish* sesuai dengan SOP, yaitu mengupload putusan ke website setelah 1 hari diputus. Perkara yang telah diputus diupload di website melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI atau Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Kondisi ini juga telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya terus berupaya meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran 3
Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan

✓ Sasaran 3 Indikator 1

Persentase Satuan Kerja Yang Telah Memiliki Sertifikasi Akreditasi

Indikator kinerja "Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi akrediitasi" digunakan sebagai tolak ukur untuk terciptanya

pelayanan publik yang memuaskan bagi para pencari keadilan guna mewujudkan kepercayaan publik atas layanan peradilan. Guna menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari keadilan, dan menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelayanan di peradilan umum terhadap badan sertifikasi eksternal maka dicanangkan pembentukan badan sertifikasi internal dan dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1455/DJU/SK/KU01/8/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tugas untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh.

Program Akreditasi Penjamin Mutu yang telah digagas oleh Badan Peradilan Umum sejak tahun 2015 telah membawa banyak perubahan dalam hal sistem manajemen mutu layanan pengadilan. Perbaikan layanan pengadilan tersebut dirumuskan dalam tujuh kriteria penilaian Akreditasi Penjamin Mutu yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Umum. Tujuh kriteria tersebut meliputi: kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan, manajemen proses, sistem dokumentasi, manajemen sumber daya dan hasil kinerja. Penjelasan rinci mengenai apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap stakeholder pengadilan negeri untuk melaksanakan akreditasi telah termuat dalam “Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum” dan telah dibentuk tim khusus untuk menilai akreditasi pengadilan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1385a/DJU/SK/OT.01.3/09/2016.

Sejak diraihnya predikat “A” *excellent* oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tanggal 24 Juli 2017 dan kemudian pada bulan Novemeber 2020 Badan Peradilan Umum melakukan asesmen surveilan terhadap Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan hasil yang diperoleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya kembali meraih predikat “A” *excellent*, maka sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 05 Mei 2017 Nomor 468/DJU/OT.01.3/5/2017 perihal Audit/Asesmen Akreditasi oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan asesmen terhadap pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kelas I B dan Kelas II di wilayah hukumnya. Sementara untuk asesmen Pengadilan Negeri Palangkaraya kelas I A masih menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pada tahun 2020, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan asesmen surveilan kepada 10 (sepuluh) satker dibawahnya dan telah dilaksanakan rapat penilaian oleh Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada bulan Februari 2021, adapun data nilai akreditasi selama tiga tahun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Nilai Akreditasi Pengadilan Negeri

SATKER	2018	2019	2020
PN Sampit	708	708	715
PN Pangkalan Bun	701	704	710
PN Kuala Kapuas	702	702	710
PN Muara Teweh	713	703	708
PN Buntok	711	700	708
PN Tamiang Layang	687	690	614
PN Kasongan	705	695	705
PN Kuala Kurun	-	700	706
PN Nanga Bulik	-	694	695
PN Pulang Pisau	-	693	705

Pada triwulan II tahun 2021 telah dilakukan asesmen surveilan terhadap pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu pada 9 (sembilan) Pengadilan Negeri Kelas I B dan Kelas II.

Pada Triwulan III tahun 2021 belum dilaksanakan asesmen surveilan terhadap Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat kasus Covid-19 di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 maka pimpinan mengambil kebijakan untuk meniadakan kunjungan ke daerah-daerah dan mengoptimalkan penggunaan media teknologi informasi *video conference* untuk menunjang pekerjaan tanpa mengurangi output/outcome capaian kinerja. Pelaksanaan asesmen surveilan untuk Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah diagendakan dan akan segera dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sampai dengan tahun 2021, seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah terakreditasi. Sehingga capaian untuk indikator kinerja **"Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi akrediitasi" adalah 100%**.

Sasaran 4
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, melalui pengawasan bidang, pengawasan daerah, serta transparansi dalam pengelolaan SDM, keuangan dan aset. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya diukur dengan 3 indikator, dengan capaian sebagai berikut :

1. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya : 96 kegiatan.
2. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya : 11 kegiatan.
3. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset : 100%

✓ Sasaran 4 Indikator 1
Jumlah pelaksanaan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam Surat Keputusan Nomor 109/KPT/SK/PS/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, bahwa telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya serta melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, selaku Koordinator Pengawasan, dan diunggah pada aplikasi Manajemen Kontrol Hatiwasbid dan Hatiwasda (MAKBIDA) paling lambat minggu ke-4 setiap bulannya.

Pelaksanaan pengawasan bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah sesuai dengan target selama tahun 2021 yaitu sebanyak **96 kegiatan** pengawasan dengan capaian **100%** dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021 yaitu 96 kegiatan pengawasan bidang. Pengawasan bidang telah dilakukan secara berkala setiap bulan serta dituangkan dalam Laporan Pengawasan Bidang. Hasil pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi masing-masing bidang untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kinerja.

✓ Sasaran 4 Indikator 2

Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam Surat Keputusan Nomor 110/KPT/SK/PS/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Daerah pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya, bahwa telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan kerja pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya serta melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaki Koordinator Pengawasan dan diunggah pada aplikasi Manajemen Kontrol Hatiwasbid dan Hatiwasda (MAKBIDA) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pengawasan.

Indikator kinerja “Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya”, telah sepenuhnya tercapai selama tahun 2021 yaitu **100%** dari target yang sudah ditetapkan. Di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pengawasan daerah telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi sehingga pengawasan bisa terlaksana baik secara langsung maupun menggunakan media *video conference*.

✓ Sasaran 4 Indikator 3

Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Indikator kinerja “Persentase transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset” digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya, khususnya pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan sebagai unit pendukung (*supporting unit*) sekaligus pendorong suksesnya pelaksanaan *core bussiness* pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Capaian untuk indikator ini untuk tahun 2021 adalah sebesar **100%**. Capain ini berdasarkan pelaksanaan peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset yang diukur dari dua kriteria yaitu:

a. Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik yang prima pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi terhadap masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Peradilan Umum telah menetapkan suatu standarisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Umum. Guna meningkatkan aksesibilitas pengadilan di tengah pandemi Covid 19, Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah berupaya dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagaiman tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12. Kelengkapan Sarana dan Prasarana PTSP

No.	Jenis Pengawasan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Sarana dan Prasarana			
1.	Tata letak Meja PTSP	√		
2.	*Backdrop* PTSP	√		
3.	Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, Kompensasi Pelayanan	√		
4.	Kesesuaian ukuran meja PTSP	√		
5.	Informasi jam layanan dan jenis layanan	√		
6.	Nomor antrian	√		
7.	Fasilitas Pendukung			
	- Kursi Pengunjung	√		
	- CCTV	√		
	- Komputer	√		
	- Printer	√		
	- Monitor Televisi	√		
	- Brosur Layanan	√		
8.	Pojok *e-court* dan meja *Inzage*	√		
9.	Aplikasi Survei			
	- IKM	√		
	- IPK	√		
	- Harian	√		
10.	CCTV	√		
11.	Aplikasi Buku Tamu	√		
	Masa Pandemi Covid-19			
1.	Alat deteksi suhu *Infrared Thermometer*	√		
2.	*Physical Distanding*	√		
3.	Wastafel Cuci	√		
	Sarana dan Parasana Disabilitas			
1.	Alat bantu mobilitas (kursi roda dan tongkat)	√		
2.	Alat bantu dengar	√		
3.	Antrian/mekanisme prioritas	√		
4.	Kursi tunggu khusus	√		
5.	Lahan parkir khusus	√		*Tersedianya*

				parkir khusus untuk pengemudi wanita dan parkir khusus untuk disabilitas
6.	Ruang Sidang Ramah Disabilitas	√		
7.	Tempat khusus bagi pengguna kursi roda di wilayah PTSP	√		
8.	Form penilaian personal pada meja layanan pidana dan perdata	√		
9.	Toilet khusus disabilitas	√		
10.	*Guiding block* dan *Warning block* menuju gedung	√		
11.	Ramp/jalur landai	√		

Berdasarkan data ketersediaan sarana dan prasarana pada tabel, sebagai tolok ukur peningkatan pelayanan publik, pemenuhannya pada tahun 2021 telah mencapai **100%**.

b. Peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Pada tahun 2021, seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang ingin dicapai selama satu tahun. Secara berkala telah dilakukan evaluasi kinerja yang dituangkan dalam Penilaian Capaian Kinerja (PCK) secara bulanan. Hal tersebut telah dilakukan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13. Penilaian Kinerja Tahun 2021
Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Palangkaraya

NO	JABATAN	NAMA	NILAI	PREDIKAT
1	Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.	Ketua	108,31	Baik
2	H. Suwidya, S.H., L.L.M.	Wakil Ketua	108,41	Baik
3	Suko Priyowidodo, S.H.	Hakim Tinggi	104,29	Baik
4	Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	104,00	Baik
5	S.H.D. Sinuraya, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	104,43	Baik
6	Togar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	105,71	Baik
7	Ajidinnor, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	104,57	Baik
8	Dwi Prapti Maryudiati, S.H.	Hakim Tinggi	104,09	Baik
9	Heru Prakosa, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	103,46	Baik
10	Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	104,35	Baik
11	Richard Silalahi, S.H.	Hakim Tinggi	103,20	Baik

12	Nawaji, S.H.	Hakim Tinggi	103,91	Baik
13	Mohammad Noor, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	103,80	Baik
14	Abdul Ra'uf, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	104,27	Baik
15	Djoko Indiarto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	103,62	Baik
16	Siti Jamzanah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	105,25	Baik
17	Anne Rusiana, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	104,45	Baik
18	H. Irwan Efendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	103,82	Baik
19	Siti Rochmah, S.H.	Hakim Tinggi	104,35	Baik
20	Akhmad Jaini, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	104,42	Baik
21	Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	103,79	Baik
22	Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	104,50	Baik
23	Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	102,79	Baik
24	Gatut Sulistyo, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	103,25	Baik
25	Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	103,44	Baik

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Tahun 2021
Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No.	NAMA	JABATAN	CAPAIAN KINERJA											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Sulaiman, S.H., M.H.	Panitera	86,79	93,66	93,44	94,03	94,04	94,05	94,06	94,05	94,22	94,24	94,25	94,25
2	Meidyawati, S.E.	Sekretaris	96,00	96,00	96,00	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
3	Faisal Sru B., S.E.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	96,60	92,15	91,65	91,33	91,00	91,00	88,67	89,00	90,53	91,33	91,33	91,56
4	Isti Yani, S.SI	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	91,28	91,09	87,78	95,78	93,50	93,72	93,72	93,72	93,83	93,94	94,06	94,17
5	Fitriya Nor Aini, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	99,00	89,00	89,00	88,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	92,51
6	Monalisa Agustina T., S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	91,67	85,73	86,50	91,50	91,51	92,38	92,30	92,59	91,76	93,13	92,78	92,84
7	Wahyu Teguh, S.E., S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	93,93	88,37	87,15	91,42	91,37	91,09	91,16	91,34	91,42	91,42	91,66	92,00
8	Muhammad Rusgiansyah, S.Hut., S.H.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	87,95	88,00	88,30	88,35	88,54	88,60	88,60	88,65	88,70	88,75	88,80	93,83
9	Masni, S.H	Panitera Muda Perdata	94,38	93,12	93,13	92,63	92,75	92,88	93,06	93,25	93,38	93,50	93,63	93,81
10	I Wayan Wasta, S.H.	Panitera Muda Pidana	91,62	97,77	97,50	98,89	98,33	96,95	98,42	98,08	95,71	97,75	97,76	96,67
11	John Morton Abdurahman, S.H.	Panitera Muda Tipikor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	NAMA	JABATAN	CAPAIAN KINERJA											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
12	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	Panitera Muda Hukum	97,69	92,38	91,64	92,38	92,62	95,78	97,23	95,27	96,62	93,51	95,00	95,31
13	Ginter, S.H.	Panitera Pengganti	90,38	90,12	90,25	90,56	90,56	90,63	90,75	91,04	91,17	91,23	91,23	91,40
14	Evi Ernawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	84,21	83,28	82,96	83,62	84,42	85,47	86,01	87,38	88,01	91,71	91,30	91,65
15	M. Yunan, S.H.	Panitera Pengganti	87,00	87,00	87,00	88,00	88,00	88,00	91,60	91,73	91,85	91,98	92,02	92,08
16	Hj. Yuhana Sari Yasmini, S.H.	Panitera Pengganti	91,00	91,22	91,44	91,52	91,57	91,69	91,85	91,91	92,02	92,24	92,46	92,61
17	Akri Yuliani, S.H.	Panitera Pengganti	91,13	91,22	91,50	91,98	92,02	92,08	92,21	92,33	92,52	92,69	92,73	92,83
18	Ahmad Gazali, S.H.	Panitera Pengganti	81,72	91,22	81,77	81,43	83,96	85,36	86,61	87,33	89,86	90,90	90,19	92,18
19	Julius Siberium Timbung, S.E.	Analis Kepegawaian Pertama	100	95,33	95,56	94,22	96,80	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	91,17
20	Abdul Yusuf, S.Sos.	Analis Kepegawaian Pertama	93,67	92,99	92,64	89,15	89,21	88,65	89,35	89,60	89,68	89,77	90,00	90,00
21	Mersia Sibarani, S.E., S.H.	Analis Perkara Peradilan	93,96	91,10	0	93,19	95,63	92,50	97,08	99,17	100	99,44	100	100
22	Sylvi Enggriani, S.H.	Analis Perkara Peradilan	94,67	92,22	94,00	94,10	92,63	93,20	92,32	93,33	94,77	92,51	94,11	93,33
23	Yudi Yusliannoor, S.H.	Analis Perkara Peradilan	95,83	90,00	93,17	93,44	93,44	93,56	93,83	93,94	94,06	94,28	94,44	94,61
24	Yunia Ariani, SH	Analis Perkara Peradilan	91,67	93,66	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,63	93,96	93,96	93,96
25	Krista, S.H.	Analis Perkara Peradilan	100	96,00	97,00	97,00	91,00	94,00	97,00	100	100	99,00	100	100
26	Muthiah Az-Zahra Rasyid, S.H.	CPNS Analis Perkara Peradilan	-	96,63	95,31	98,28	95,42	95,00	98,28	98,44	100	98,13	98,59	96,56
27	Joni Petrus, S.H.	Analis Protokol	91,94	85,00	84,92	84,98	85,40	85,79	86,02	86,25	86,67	87,19	87,40	87,58
28	Julianto, S.H.	Penyusun Laporan Keuangan	95,83	80,17	85,50	92,89	95,33	90,67	90,40	91,40	91,73	91,23	91,40	92,84
29	Apridius, S.E., M.Si.	Penyusun Laporan Keuangan	91,28	91,09	91,19	91,15	91,39	91,67	91,17	91,72	91,88	92,00	92,13	92,56
30	Evi Katsiani, S.E.	Bendahara	88,00	93,66	91,15	92,08	92,08	92,12	92,27	92,41	92,49	92,87	93,20	93,30
31	Junaldi Singarimbun, S.E.	Bendahara	99,44	86,56	90,22	89,89	89,11	89,84	90,11	90,51	90,73	91,00	91,02	92,89
32	Susilawati, S.H.	Bendahara	93,33	85,97	87,08	85,97	90,14	87,00	90,56	90,56	90,14	90,69	91,11	93,19
33	Akhmad Darkuni, S.Sos., M.A.P.	Pengelola Perkara	87,67	86,77	84,64	84,28	84,92	89,68	89,68	92,41	93,37	93,58	92,41	94,45
34	Roberto Asintongan P., A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	86,67	90,00	85,00	86,67	87,92	87,00	87,50	86,67	85,83	86,67	88,00	84,17
35	Yogi Nugraha Putra, A.Md.T.	Pengelola Sistem dan Jaringan	91,90	91,56	92,13	92,13	91,37	92,13	89,16	92,38	91,75	92,19	92,38	92,40
36	Bangga Chrysto Tarigan, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan	92,34	94,00	89,29	89,15	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
37	Uner	Pengadministrasi Persuratan	90,50	86,65	84,17	83,75	85,06	85,06	85,06	83,44	83,44	83,44	83,61	83,61
38	Mikhael Jan Tonggo Tua SIHOMBING, A.Md.	CPNS Pengadministrasi Registrasi Perkara	-	100	100	100	96,67	97,22	100	94,44	94,44	99,17	97,62	100

3. *Realisasi Anggaran*

Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari DIPA BUA Mahkamah Agung RI (005.01.400358) selanjutnya disebut DIPA 01 dan DIPA BADILUM Mahkamah Agung RI (005.03.400359) selanjutnya disebut DIPA 03. Revisi DIPA 01 dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali karena adanya pengembalian Anggaran Bimtek Kesekretariatan, pergeseran POK anggaran Belanja Barang (52), serta penyelesaian pagu minus untuk Belanja Pegawai (Akun 51). Sementara revisi DIPA 03 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena pergeseran POK Anggaran Belanja (52).

a. DIPA 01 (BUA)

Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk DIPA 01 mendapat anggaran sebesar Rp. Rp.23.743.403.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 23.203.940.666,00 atau terserap 97.73%.

Anggaran paling besar adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar **Rp.19.705.802.000,00** atau sekitar **82.99%** dari total pagu anggaran, kemudian disusul oleh Belanja Barang sebesar **Rp.4.000.101.000,00** atau sekitar **16.85 %** dari total pagu anggaran, dan Belanja Modal **Rp37.500.000,00** atau sekitar **0.16%** dari total pagu anggaran.

Tabel 3.15 Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Capaian Tahun Anggaran 2019 – 2021

TA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	18.488.701.000	18.320.055.728	99.09
2020	23.080.968.000	22.904.494.191	99.24
2021	23.743.403.000	23.203.940.666	97.73

Grafik 3.4. Pagu dan Realisasi Tahun Anggaran 2019-2021

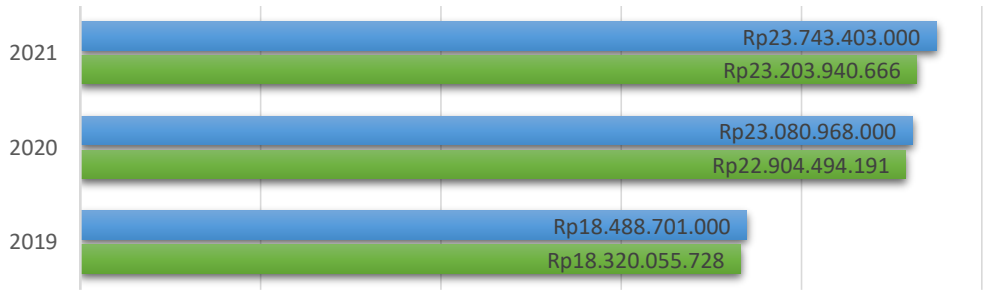

	2019	2020	2021
PAGU	Rp18.488.701.000	Rp23.080.968.000	Rp23.743.403.000
REALISASI	Rp18.320.055.728	Rp22.904.494.191	Rp23.203.940.666

Sedangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja dan *output* dapat dilihat pada tabel 3.11 dan tabel 3.12.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Dipa 01 TA. 2021 per jenis belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Aggaran	Capaian %
1	Belanja Pegawai	19.705.802.000,00	19.496.910.365,00	98.94
2	Belanja Barang	4.000.101.000,00	3.670.130.301,00	91.75
3	Belanja Modal	37.500.000,00	36.900.000,00	98.40
Total Pagu dan Realisasi Anggaran		23.743.403.000,00	23.203.940.666,00	97.73

Grafik 3.5. Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja

Jika melihat realisasi per jenis belanja, penyerapan belanja pegawai sebesar Rp. 19.496.910.365,- atau terserap 98.94% dari pagu anggaran belanja pegawai.

Belanja barang dengan realisasi sebesar 3.670.130.301,- atau terserap 91.75%. Hal ini terjadi karena situasi pandemi Covid 19 dengan tingkat kasus positif (*positivity rate*) yang masih tinggi di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah sehingga beberapa kegiatan seperti konsultasi ke pusat, pembinaan/ rapat koordinasi pada tingkat banding, konsultasi ke DJKN dan adanya kegiatan bimbingan teknis tidak dapat dilakukan secara maksimal, hanya

dilakukan via daring (***zoom meting***) sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran dan menyebabkan dilakukannya revisi anggaran.

Pada belanja modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.900.000,00 atau terserap 98.40%.

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Dipa 01 pada TA 2021 per *output*

No	*Output*	Pagu	Realisasi Aggaran	Capaian %
1	Layanan Perkantoran ❖ Gaji dan tunjangan ❖ Kegiataan Operasional Perkantoran	23.628.512.000	23.111.912.243	97.81
2	Layanan Dukungan Manajemen Peradilan ❖ Non operasional satker daerah (Bimtek, penangangan pandemic covid 19, Pembangunan ZI Sosialisasi)	77.391.000	55.128.423	71.23
3	Pengadaan sarana dan prasarana ❖ Pengadaan Perangkat pengolah data komunikasi (PC Kepaniteraan)	37.500.000	36.900.000	98.40
Total Pagu dan Realisasi Anggaran		23.680.865.000	23.203.940.666	97.73

Grafik 3.6. Realisasi Anggaran Dipa 01 pada TA 2021 per output

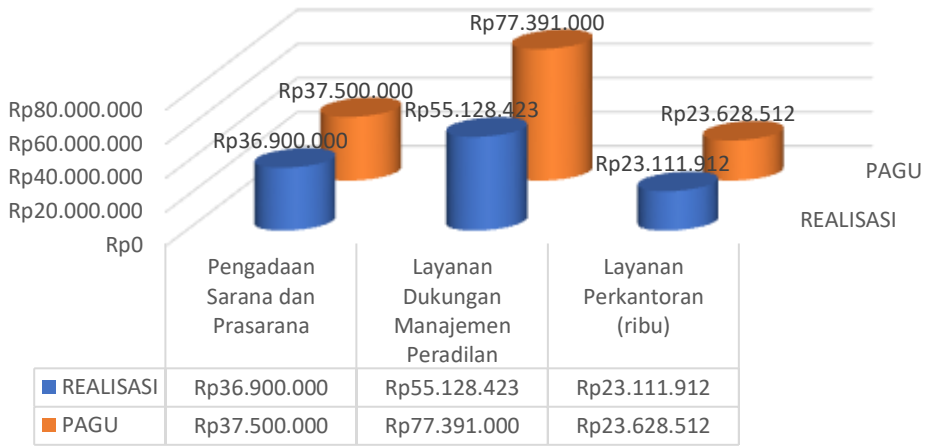

Adapun perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18 Perbandingan PAGU dan Realisasi Belanja DIPA 01 Tahun 2019 - 2021

Jenis Belanja	TA	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Pegawai	2019	15.928.107.000	15.861.261.830	99.58
	2020	19.308.582.000	19.299.332.090	99.95
	2021	19.705.802.000	19.496.910.365	98.94
Belanja Barang	2019	2.414.094.000	2.314.127.398	95.86
	2020	3.747.386.000	3.581.162.101	95.56
	2021	4.000.101.000	3.670.130.301	91.75
Belanja Modal	2019	146.500.000	144.666.500	98.75
	2020	25.000.000	24.000.000	96
	2021	37.500.000	36.900.000	98.4

Grafik 3.7. Realisasi Anggaran DIPA 01 TA 2021 per Jenis Belanja

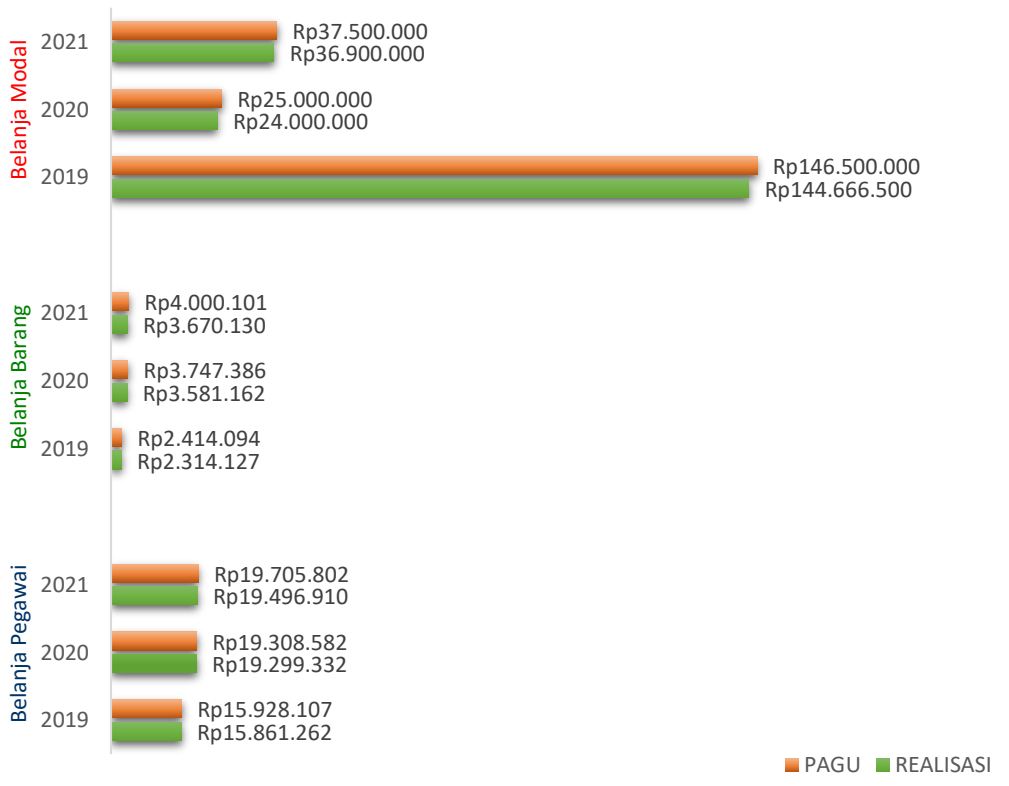

b. DIPA 03 (DIRJEN BADILUM)

Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk DIPA 03 mendapatkan anggaran sebesar Rp.302.711.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.274.985.248,00 atau terserap 90.84%. Sedangkan realisasi anggaran

tahun 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan *output* dapat dilihat pada tabel berikut :

a) Belanja Belaja Pengiriman Surat Dinas Pos.

b) Belanja Bahan

c) Belanja Barang Persedian

d) Belanja Perjalanan dinas

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Dipa 03 pada TA 2021 per *output*

No	*Output*	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian %
1	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan pada Tk. Banding	69.120.000,00	59.001.633,00	85.36
2	Penyelesaian perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada Tk. Banding	6.991.000,00	4.617.883,00	66.06
3	Kompetensi SDM peningkatan kualitas tenaga teknis (Non Hakim) di pengadilan	151.600.000,00	136.603.285,00	90.11
4	Monitoring kebijakan pelayanan peradilan (Perjadin Pembinaan dan Pengawasan)	75.000.000,00	74.762.497,00	99.68
Total PAGU dan Realisasi Anggaran		**302.711.000,00**	**274.985.298,00**	**90.84**

Grafik 3.8. Realisasi Anggaran Dipa 03 pada TA 2021 per *output*

Dari tabel 3.15 dapat dilihat bahwa :

1) Pada *output* Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan pada Tk. Banding, realisasi anggaran sebesar Rp.59.001.633,00 atau terserap sebesar 85.36% dari pagu anggaran pada *output* ini, diperoleh dari pembiayaan 179 perkara pidana yang diselesaikan pada TA 2021.
2) Pada *output* Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan pada Tk. Banding realisasi anggaran sebesar Rp.4.617.883,00 atau terserap sebesar 66.06% dari pagu anggaran pada *output* ini, diperoleh dari pembiayaan 8 perkara Pidana Khusus / Perkara Pidana Korupsi.
3) Pada *output* Kompetensi SDM Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis (Non Hakim) di pengadilan, realisasi anggaran Rp.74.762.497,00 atau terserap sebesar 90.11% dari pagu anggaran pada *output* ini, yang dilaksanakan Triwulan IV.
4) Pada *output Monitoring* kebijakan pelayanan peradilan, realisasi anggaran Rp.74.762.497,00 atau terserap 99.68% dari pagu anggaran pada *output* ini.

Adapun perbandingan Realisasi Anggaran untuk Belanja Barang (Akun 52) Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2019-2021

Jenis Belanja	TA	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Belanja Barang	2019	167.169.000	163.098.576	97.57
	2020	274.055.000	256.363.344	93.54
	2021	302.711.000	274.985.298	90.84

c. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tahun Anggaran 2021 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diterima dan disetorkan Pengadilan Tinggi Palangkaraya ke kas negara sebesar Rp. 66.245.374,00 yang terdiri atas pendapatan PNBP Umum (DIPA 01) sebesar Rp. 64.115.374,00 dan PNBP Fungsional (DIPA 03) sebesar Rp. 2.130.000,00. PNBP Fungsional (DIPA 03) berasal dari Pendapatan Uang Meja (Leges) (akun 425232) dan Pendapata Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (akun 425239).

PNBP Umum (DIPA 01)

Realisasi PNBP Umum sebesar Rp. 64.115.374,00 yaitu pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMN berupa sewa rumah dinas tahun 2021 dan sewa tanah untuk mesin ATM BRI untuk dua tahun (2020-2021).

Tabel 3.21 PNBP Umum Tahun 2019-2021

Jenis Pendapatan	TA	Target Pendapatan	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	**2019**	30.673.000	41.398.372	134.97
	2020	28.952.000	27.380.490	94.57
	2021	28.952.000	64.115.374	221.45

Grafik 3.10. PNBP Umum Tahun 2019-2021

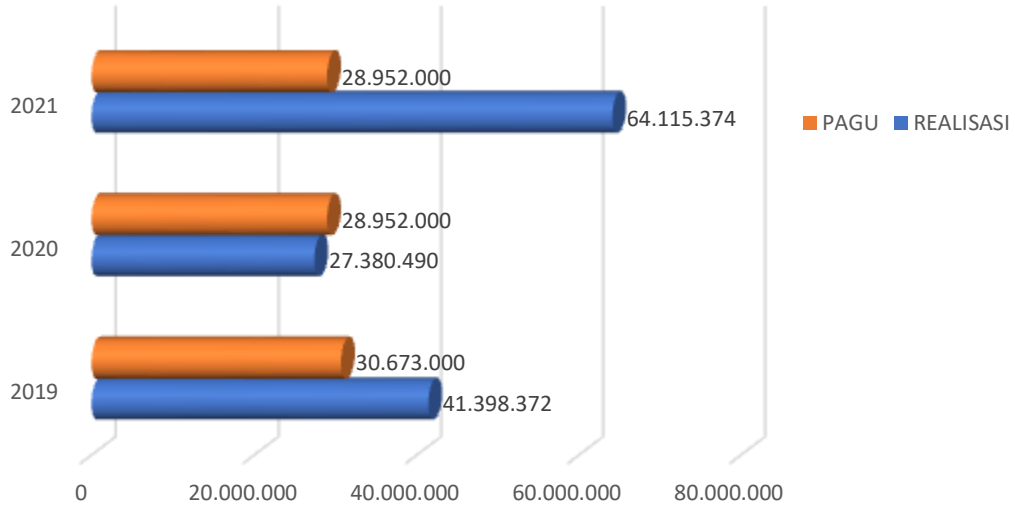

PNBP Fungsional (DIPA 03)

Realisasi PNBP Fungsional sebesar Rp. 2.130.000,00 berupa Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, dan Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya selama tahun 2021.

Tabel 3.22 PNBP Fungsional Tahun 2019-2021

Jenis Pendapatan	TA	Target Pendapatan	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Uang Meja (Leges) (425232)	**2019**	0	0	-
	2020	0	90.000	-
	2021	0	510.000	-
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239)	**2019**	575.000	1.025.000	178.26
	2020	705.000	1.220.000	173.05
	2021	985.000	1.620.000	164.47

Grafik 3.11. PNBP Fungsional Tahun 2019-2021

d. KEUANGAN PIHAK KETIGA (BIAYA PERKARA PERDATA)

Sebagai tindaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan berikut kami sajikan Informasi Keuangan Perkara yang Dibiayai Oleh Para Pihak (Perkara Perdata).

Tabel 3.23 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021

SISA 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
6	117	117	6

Tabel 3.24 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2021

URAIAN	SALDO AWAL (Des 2020)	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR (Saldo Awal + Penerimaan – Pengeluaran)
Biaya Perkara	Rp. 900.000	Rp. 150.000 x 117 berkas = **17.550.000** (ditambah Rp. 7.000, kekurangan biaya materai menjadi Rp. **17.557.000**)	Rp. 150.000 x 117 berkas = **17.550.000** (dikurang Rp. 24.000, dari biaya materai menjadi Rp. **17.533.000**)	Rp. 900.000

Pada tahun 2021 terdapat perubahan biaya materai yang seharusnya Rp. 10.000 namun di bulan januari masih sebesar Rp. 6.000 dan di bulan februari sebesar Rp. 9.000, sehingga terdapat selisih jumlah penerimaan dan pengeluaran. Adapun rincian biaya pengeluaran dan pengeluaran sebesar Rp. 150.000 adalah sebagai berikut :

Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000
Biaya Materai : Rp. 6.000
Biaya Redaksi : Rp. 10.000 +
Total : Rp. 150.000

BAB IV
PENUTUP

1. *Kesimpulan*

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama kurun waktu tahun 2021 yang dituangkan menjadi 4 (empat) sasaran dan tujuan strategis, yaitu :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
c) Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan
d) Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya merupakan suatu perwujudan yang transparan dan akuntabel dari lembaga peradilan, karena pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangkaraya ini melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2021 yang dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2020- 2024.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya tahun 2021 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata, baik dari Bidang Kepaniteraan maupun Bidang Kesekretariatan, dengan mengevaluasi *standard operation procedure (SOP)* yang sedang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kinerja Instansi Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai institusi yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi lebih berwibawa dan mandiri serta menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat terlaksana berkat kerja keras setiap unit dan komponen pendukungnya yang saling mengisi, terencana, sistematis, dan terprogram secara komprehensif dimana pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya berhasil memperoleh penghargaan Juara II Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk yang kedua kalinya, memperoleh predikat “A *Excelent”* Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Direktorat Badan Peradilan Umum. Pada tahun 2021, Pengadilan

Tinggi Palangkaraya telah diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun belum berhasil.

Ditengah masa pandemi *Covid*-19 yang melanda dunia, Pengadilan Tinggi Palangkaraya tetap berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan anggaran yang telah diamanatkan dalam DIPA Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021, baik itu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) maupun DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum) dengan realisasi anggaran mencapai 97,73% untuk DIPA 01 dan 90,84% untuk DIPA 03. Sementara untuk realisasi keuangan pihak ketiga mencapai 99,86%.

Dengan diterbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021, diharapkan dapat menggambarkan kinerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja Instansi Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada tahun yang akan datang.

2. *Saran*

a) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan badan peradilan.

b) LKjIP, sebagai akhir dari SAKIP, dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Tinggi Palangkaraya, guna peningkatan kinerja tahun berikutnya.

c) Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.

d) Dengan penggunaan anggaran yang *efisien* dan tepat sasaran, diharapkan tetap dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

e) Kelayakan LKjIP sebagai instrument *punishment and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

f) Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 4 Januari 2021

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 19590511 198403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun II (2021)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		3. Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu.	100 %
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	55 %
		5. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.	98 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100 %
3	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	1. Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100 %
4	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya	1. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	96

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun II (2021)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		2. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya	11
		3. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp23.840.394.000,00	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp278.011.000,00	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

Palangka Raya, 4 Januari 2021

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 19590511 198403 1 004

Lampiran 2

Pengukuran Kinerja Triwulanan

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN TAHUN 2021

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	4	4 100,00%	100,00	1	1 100,00%	100,00	1	1 100,00%	100,00	0	0 0,00%	0,00

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

2.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	42	42 100,00%	100,00	32	32 100,00%	100,00	45	45 100,00%	100,00	50	50 100,00%	100,00
3.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	40	40 100,00%	100,00	22	22 100,00%	100,00	31	31 100,00%	100,00	25	25 100,00%	100,00
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	295	177 60,00%	109,09

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	40	40 100,00%	100,00	32	32 100,00%	100,00	48	48 100,00%	100,00	51	51 100,00%	100,00
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	4	4 100,00%	100,00	1	1 100,00%	100,00	1	1 100,00%	100,00	0	0 0,00%	0,00
7.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		40	40 100,00%	0,00	22	22 100,00%	0,00	31	31 100,00%	0,00	25	25 100,00%	0,00

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	98	0	0 0,00%	0,00	79	73 92,41%	93,88	0	0 0,00%	0,00	28	28 100,00%	102,04

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1.	*Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi*	*Rp 24.941.674.000*
2.	*Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikas*	*RP 77.500.000*
3.	*Progam Penegakan dan Pelayanan Hukum*	*Rp 297.411.000*

Lampiran 3

Pernyataan Telah Direviu

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palangka Raya, 18 Februari 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. Zainuddin

FORMULIR REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

No	Pernyataan		*Check List*
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	✓
		4. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	✓
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan.	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	✓

No	Pernyataan		Check List
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	✓
		6. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
		10. IKU dan IK telah SMART.	✓

Palangka Raya, 18 Februari 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. Zainuddin

Lampiran 4

Matriks Kinerja dan Pendanaan
Tahun 2020-2024

Pengadilan Tinggi Palangkaraya

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020-2024
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Program Kegiatan	Sasaran Program (*outcome*)/ Sasaran Kegiatan (*output*)/Indikator	Lokasi	Target (%)					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA								20.896.950	24.118.405	26.530.246	29.183.270	32.101.597	
Sasaran Strategi	**Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel**												Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						
	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						
	Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						
	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		*40*	*55*	*57*	*59*	*60*						
	Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding		*90*	*98*	*98*	*98*	*98*						
Sasaran Strategi	**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara**												Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu*		*90*	*100*	*100*	*100*	*100*						
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						

Sasaran Strategi	**Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan**												Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi akreditasi*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						
Sasaran Strategi	**Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya**												Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	*Jumlah pelaksanaan Pengawasan Bidang pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya*		*96*	*96*	*96*	*96*	*96*						
	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya		*11*	*11*	*11*	*11*	*11*						
	Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*						Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM								316.220	278.011	305.812	336.393	370.032	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Sasaran Program	**Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Palangkaraya**												
Indikator Kinerja Program	*Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana,tepat wantu,transparan dan akuntabel*		*150*	*93*	*119*	*120*	*125*						
	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan tenaga teknis Peradilan Umum		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*						
	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan peradilan		*11*	*11*	*11*	*11*	*11*						

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM								316.220	278.011	305.812	336.393	370.032	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Sasaran Kegiatan	**Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Pengadilan Tinggi Palangkaraya**												
Indikator Kinerja Kegiatan	*Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat banding tepat waktu*		*150 pkr*	*93 pkr*	*119 pkr*	*120 pkr*	*125 pkr*						
	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan		*50 org*	*50 org*	*50 org*	*50 org*	*50 org*						
	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi		*11 Lpr*	*11 Lpr*	*11 Lpr*	*11 Lpr*	*11 Lpr*						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								20.580.730	23.840.394	34.831.434	37.879.770	41.298.097	Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Sasaran Program	**Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan**												
Indikator Kinerja Program	*Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung*		*99%*	*99%*	*99%*	*99%*	*99%*						
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI								20.555.730	23.802.894	26.186.934	29.145.770	32.064.097	Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Sasaran Kegiatan	**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan**												
Indikator Kinerja Kegiatan	*Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran*		*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*						
	Jumlah pelaksanaan layanan umum		*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*						

Sasaran Program	**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan**												
Indikator Kinerja Program	*Jumlah pengadaan Kendaraan Bermotor*				*3 unit*	*3 unit*	*3 unit*						
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		*2 unit*	*3 unit*	*1 pkt*	*1 pkt*	*1 pkt*						
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				*1 pkt*	*1 pkt*	*1 pkt*						
	Jumlah pengadaan pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan				*1 pkt*	*1 pkt*	*1 pkt*						
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA								25.000	37.500	8.644.500	8.734.000	9.234.000	Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Sasaran Kegiatan	**Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan**												
Indikator Kinerja Kegiatan	*Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan*		*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*	*1 Lay*						

Lampiran 5

SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Notelen Rapat

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
NOMOR : 20 /KPT/OT.01.1/SK/1/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, wajib merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana huruf (a) maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA.

Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini menjadi Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Kedua : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas menyusun dan menyajikan dokumen LKjIP Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 20 Januari 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. Zainuddin

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
Nomor : 20 /KPT/OT.01.1/SK/1/2022
Tanggal : 20 Januari 2022

Ketua Tim : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Penanggung Jawab Bagian Kepaniteraan : Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Penanggung Jawab Bagian Kesekretariatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No	*OUTLINE*	TIM	JABATAN
1	**Bab I Pendahuluan**		
	Pendahuluan	**Koordinator :** Togar, S.H., M.H. **Anggota** : 1. Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. 2. Wahyu Teguh, S.E., S.H. 3. M. Rusgiansyah, S.Hut., S.H. 4. Yunia Ariani, S.H.	 Hakim Tinggi Hakim Tinggi Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran Analis Perkara Peradilan
2.	**Bab II Perencanaan Kinerja**		
	Rencana Strategis **Perjanjian Kinerja**	**Koordinator :** S.H.D. Sinuraya, S.H., M.H. **Anggota** : 1. Djoko Indiarto, S.H., M.H. 2. Anne Rusiana, S.H., M.Hum. 3. Akhmad Jaini, S.H., M.H. 4. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 5. Apridius, S.E., S.H., M.Si.	 Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Penyusun Laporan Keuangan

3.	**Bab III Akuntabilitas Kinerja**		
A.	**Capaian Kinerja Organisasi**	**Koordinator :** Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. **Anggota** : 1. Richard Silalahi, S.H. 2. Mohammad Noor, S.H., M.H. 3. Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. 4. Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. 5. Gatut Sulistyo, S.H., M.H. 6. John M. Abdurrahman, S.H. 7. Masni, S.H. 8. Harly Marlyn Simanjuntak, S.H. 9. I Wayan Wasta, S.H. 10. Abdul Yusuf, S.Sos. 11. Mersia Sibarani, S.E. 12. Yudi Yusliannoor, S.H.	 Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Ad Hoc Tipikor Panitera Muda Khusus Tipikor Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Panitera Muda Pidana Analis Kepegawaian Ahli Pertama Analis Perkara Peradilan Analis Perkara Peradilan
B.	**Realisasi Anggaran**	**Koordinator :** Maurid Sinaga, S.H., M.Hum. **Anggota** : 1. Ajidinnor, S.H., M.H. 2. Heru Prakosa, S.H., M.H. 3. Nawaji, S.H. 4. Siti Jamzanah, S.H., M.H. 5. Irwan Efendi, S.H., M.H. 6. Isti Yani, S.Si. 7. Monalisa Agustina Toewak, S.E. 8. Evi Katsiani, S.E. 9. Julianto, S.H. 10. Mikhael Jan Tonggo Tua Sihombing, A.Md.	 Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Kabag. Umum dan Keuangan Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan Bendahara Proses Penyusun Laporan Keuangan Pengadministrasi Registrasi Perkara

4.	**Bab IV Penutup**		
	Kesimpulan dan Saran	**Koordinator** : Suko Priyowidodo, S.H. **Anggota** : 1. Abdul Ra'uf, S.H., M.H. 2. Siti Rochmah, S.H. 3. John M. Abdurrahman, S.H. 4. I Wayan Wasta, S.H. 5. Fitriya Nor Aini, S.E. 6. Junaldi Singarimbun, S.E. 7. Sylvi Enggriani, S.H. 8. Muthiah Az-Zahra Rasyid, S.H.	 Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Panitera Muda Khusus Tipikor Panitera Muda Pidana Kasubbag. Kepegawaian dan TI Bendahara Pengeluaran Analis Perkara Peradilan Analis Perkara Peradilan
	Tim Kompilator	**Koordinator** : Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. **Anggota** : 1. Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H. 2. Sulaiman, S.H., M.H. 3. Meidyawati, S.E. 4. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 5. Isti Yani, S.Si. 6. Harly Marlyn Simanjuntak, S.H. 7. Apridius, S.E., S.H., M.Si. 8. Yudi Yusliannoor, S.H. 9. Roberto Asintongan, A.Md. 10. Bangga Crysto Tarigan, A.Md.	 Hakim Tinggi Hakim Ad Hoc Tipikor Panitera Sekretaris Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Kabag. Umum dan Keuangan Panitera Muda Hukum Penyusun Laporan Keuangan Analis Perkara Peradilan Pengelola Sistem dan Jaringan Pengelola Sistem dan Jaringan

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. Zainuddin

Lampiran 6

Notulen Rapat Penyusunan LKjIP

Tahun 2021

NOTULEN RAPAT

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

2022

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Palangka Raya, 08 Februari 2022

Diperiksa oleh:	Dibuat Oleh:
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,	Notulen,
H. SUWIDYA, S.H., LL.M.	YOGI NUGRAHA PUTRA, A.Md.T
NIP. 19600112 198612 1 002	NIP. 19940918 201903 1 009

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

HARI/TANGGAL RAPAT	SELASA / 08 FEBRUARI 2022	CEKLIS LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	RUANG RAPAT ISEN MULANG, PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	☒	DOKUMENTASI FOTO
MULAI WAKTU RAPAT	PUKUL 09.00 – 10.00 WIB	☒	UNDANGAN
POKOK BAHASAN RAPAT	RAPAT PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2021 PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	☒	DAFTAR HADIR
PIMPINAN RAPAT	H. SUWIDYA, S.H., LL.M. (WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA)	☐	
MODERATOR	-		
MC	-		
NOTULIS	YOGI NUGRAHA PUTRA, A.Md.T		

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dihadiri oleh Tim Penyusun LKjIP PT Palangka Raya, berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Selanjutnya rapat dibuka oleh pimpinan rapat.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dilanjutkan dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut:

1. Membacakan susunan Tim Penyusun LKjIP sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 20/KPT/OT.01.1/SK/1/2022 tanggal 20 Januari 2022.
2. Dilakukan evaluasi pembahasan terhadap hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Nomor 1545/BP/OT.01.2/8/2021 tanggal 13 Agustus 2021, hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instansi memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
4. Instansi menjelaskan capaian kinerja dibandingkan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

5. Laporan tersebut dikirim paling lambat tanggal 28 Februari 2021.
6. Dokumen LKjIP membahas 2 kriteria yaitu realisasi kinerja utama *core bisnis* oleh bagian Kepaniteraan dan realisasi anggaran oleh bagian Kesekretariatan.
7. Bagian Perencanaan sudah membuat timeline penyusunan LKjIP untuk bulan Februari 2022 mulai dari rapat penyusunan draft awal LKjIP sampai dengan rapat finalisasi LKjIP (data terlampir).
8. Penyusunan ikhtisar eksekutif belum bisa dibuat karena menunggu Bab III selesai dibuat.
9. Pengumpulan data untuk pembuatan Bab III dikoordinir oleh Hatiwasbid masing-masing bersama Panmud untuk selanjutnya diserahkan kepada koordinator data untuk Bab III, Bapak Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. Selanjutnya data diserahkan kepada Panitera untuk dianalisa dan dituangkan dalam Bab III LKjIP.
10. Berdasarkan pembahasan mengenai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh BAWAS MARI terdapat 5 kriteria yang direkomendasi terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja.
11. Keuangan Perkara untuk tingkat banding yang terdiri dari biaya proses dan biaya perkara akan disajikan di dalam Bab III pada realisasi anggaran sesuai rekomendasi hasil evaluasi AKIP BAWAS MARI.
12. Seluruh bab dalam LKjIP yang sudah selesai dibuat dapat diserahkan kepada tim kompilator selambatnya tanggal 14 Februari 2022.
13. Selanjutnya tanggal 14 s.d. 16 Februari 2022 Tim kompilator menyusun LKjIP sampai menjadi sebuah laporan lengkap (buku) dan akan dilakukan rapat finalisasi LKjIP pada tanggal 17 Februari 2022.
14. Tahap pengiriman LKjIP diselesaikan sebelum batas akhir penyampaian laporan tanggal 28 Februari 2022.

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

LAMPIRAN

Foto 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, selaku Ketua Tim, memimpin rapat.

Foto 2. Rapat diikuti oleh Tim Penyusun LkjIP

Timeline Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Bulan Pebruari 2022

No.	Kegiatan	Tanggal																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	**Rapat Penyusunan Draft Awal LKjIP**												Sabtu dan Minggu							Sabtu dan Minggu							Sabtu dan Minggu		
2	**Rapat mandiri setiap TIM per BAB LKjIP**																												
3	**Penyerahan hasil per BAB ke Tim Kompilator**																												
4	**Kompilasi oleh Tim Kompilator**																												
5	**Rapat Finalisasi LKjIP**																												
6	**Penyerahan hasil rapat finaslisasi ke Subbag RPA untuk proses Penjilidan LKjIP**																												
7	**Pengiriman LKjIP**																												

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
selaku
Ketua TIM Penyusun LKjIP Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. Suwidya, S.H., LL.M.
NIP. 19600112 198612 1 002

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

Palangka Raya, 7 Pebruari 2022

Perihal : UNDANGAN

Yth :
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021
Pada Pengadilan Tinggi Palangkarya
di –
tempat

Dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2021, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk mengikuti rapat penyusunan LKjIP dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 8 Pebruari 2022
Pukul	:	09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Isen Mulang Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Agenda	:	Penyusunan Draft Awal LKjIP Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusun LKjIP
Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. Suwidya

DAFTAR HADIR

RAPAT PENYUSUNAN LKjIP PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Pebruari 2022

Waktu : 09.00 - selesai

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	SUNDYA	WKPT	
2.	METDYAWATI	SEKRETARIS	
3.	Anne Rusiana	HT	
4.	SITI ROCHMAH	HT	
5.	Apdinur	HT.	
6.	SUKO PW	HT	
7.	Gatut. S.	HAT	
8.	Rinehard Hakeh	HT	
9.	Munid Siraga	HT	
10.	M. Rusyanyah	KRPA	
11.	Yogi Migrawan P	RPA	

NO	NAMA	JABATAN	TTD
12.	Yunia Ariani	Pelaksana	
13.	INDERSIA SIBARANI	PELAKSANA	
14.	TOGAR	HT	
15.	Tri Andita Jurishiawati	HT	
16.	SITI JAMIZANAH	HT	
17.	Djoko Indianto.	HT.	
18.	Wahyu PW	HT	
19.	Sulaiman	Paniter	
20.	Isti Yan	Kabag U&K	
21.	Didit Susilo G	HT	
22.	A. Rauf	HT	
23.	I WAYAN WARTA	pam mut fasilitas	

NO	NAMA	JABATAN	TTD
24.	John Martin A	Pan Mul TIPIKOR	
25.	Faisal Sru Bramantyo	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	
26.	Apridius	Pdalkam	
27.	Fitrifan	Ksb KP-TI	
28.	~~MERSTA~~		
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

NO	NAMA	JABATAN	TTD
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			

Mengetahui,
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

H. SUWIDYA, S.H., L.L.M.
NIP. 19600112 198612 1 002